

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pariwisata adalah kesatuan dari beberapa elemen terkait yang didalamnya terdiri dari wisatawan, suatu daerah yang menjadi tujuan wisata, perjalanan, industri dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari kegiatan kepariwisataan. Salah satu unggulan dari sumber devisa negara adalah kepariwisataan karena Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang mempunyai keberagaman kegiatan kepariwisataan, contohnya seperti wisata alam, sosial dan juga wisata mengenai budaya yang luas tersebar dari Sabang hingga Merauke. Selain banyaknya pesona wisata alam nya yang sangat memukau, Negara Indonesia juga kaya akan wisata budayanya yang terbukti dengan sangat banyaknya berbagai macam bentuk peninggalan-peninggalan sejarah dan juga dengan beragamnya seni dan adat budaya masyarakat lokal yang begitu menarik bagi wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri, sehingga dengan begitu melimpahnya potensi yang Indonesia miliki menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari daerah tujuan wisata.

Pariwisata di Indonesia dewasa ini telah dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi yang penting dan diharapkan dapat menjadi penghasil devisa yang besar bagi negara. Dalam situasi demikian, dituntut adanya kebijakan kepariwisataan yang ideal untuk negeri ini. Disamping menjadi mesin penggerak ekonomi, pariwisata juga merupakan sarana yang menarik untuk dapat mengurangi angka pengangguran, mengingat berbagai jenis wisata dapat dilakukan dimana saja

(*footlose*). Pembangunan wisata dapat dilakukan di daerah yang pengaruh penciptaan lapangan kerjanya paling menguntungkan. Industri pariwisata Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai modal dalam rangka pembangunan nasional.

Potensi pariwisata negeri ini didukung dengan kondisi-kondisi alamiah yang dimiliki, seperti letak keadaan geografis (lautan dan daratan), lapisan tanah yang subur dan panorama alam yang sangat indah sebagai akibat dari ekologi geologis, tetapi juga berupa kekayaan flora dan fauna serta keragaman budaya. Industri pariwisata di Indonesia memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Bahkan pada beberapa daerah menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama. Pariwisata memberikan tawaran kepada wisatawan dalam negeri serta wisatawan manca negara berupa keindahan alam seperti air terjun, lembah, sungai, panorama pegunungan, danau, keanekaragaman hayati dan pesona alami lainnya seperti terumbu karang, pantai yang indah dan lain sebagainya. Pertemuan Nasional Pariwisata mendefinisikan pariwisata sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab ditempat-tempat/daerah-daerah alami dan atau tempat-tempat/daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam yang mendukung upaya-upaya pelestarian/penyelamatan lingkungan (alam dan kebudayaannya) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan definisi tersebut maka keberhasilan pembangunan pariwisata dapat dilihat dari kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pariwisata menjadi salah satu primadona bagi negara-negara dalam meningkatkan sumber pendapatannya diluar dari migas dan pajak. Saat ini Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mulai mempromosikan negaranya guna menarik pandangan mata dunia lain, hal ini dimaksudkan agar Indonesia semakin terkenal bagi warga/penduduk negara lain untuk berkunjung ke Indonesia. Promosi-promosi yang dilakukan adalah menjual keragaman wisata dan budaya Indonesia, hal inilah ditanggapi positif dengan banyaknya wisatawan dari mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

Berkembangnya industri pariwisata yang ada di Indonesia, pemerintah dituntut keras untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan serta program yang mendorong kepariwisataan dengan baik. Kebijakan dan program kepariwisataan harus disusun dan dijalankan dengan sangat teliti agar tidak terjadi kegagalan atau mengurangi potensi-potensi kegagalan dalam pelaksanaannya. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang secara tegas menyatakan adanya pengembangan otonomi daerah yang luas dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyebabkan terjadinya pengalokasian tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan yang selama ini terkonsentrasi di pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana peran dan keterlibatan masyarakat akan semakin dominan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, otonomi daerah memiliki pengertian yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan juga mengurus sendiri terkait urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sektor pariwisata ikut berperan penting dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisata, bahwa kepariwisataan berfungsi dalam memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan juga intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sektor pariwisata adalah sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, tertuang juga dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang tahun 2015-2025.

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang tahun 2015-2025 pembahasan mengenai “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, dan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata. Selain itu mengenai sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

Setelah Pemerintah Kota Semarang sadar akan pentingnya kegiatan pada sektor pariwisata, dengan adanya tagline “*Variety of Culture*” Pemerintah Kota Semarang terus membenahi pelayanannya pada sektor pariwisata. Museum Lawang Sewu merupakan salah satu objek wisata yang berdampak pada kebijakan

pariwisata yang diterapkan di Kota Semarang. Mulai pada tahun 2015, tingkat kunjungan wisatawan selalu mengalami kenaikan, sehingga objek wisata Museum Lawang Sewu seringkali diintikan dengan ikon Kota Semarang.

Tabel berikut ini merupakan data jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri ke Jawa Tengah Pada tahun 2017. Secara rinci, data jumlah kumulatif wisatawan manca negara selama periode Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

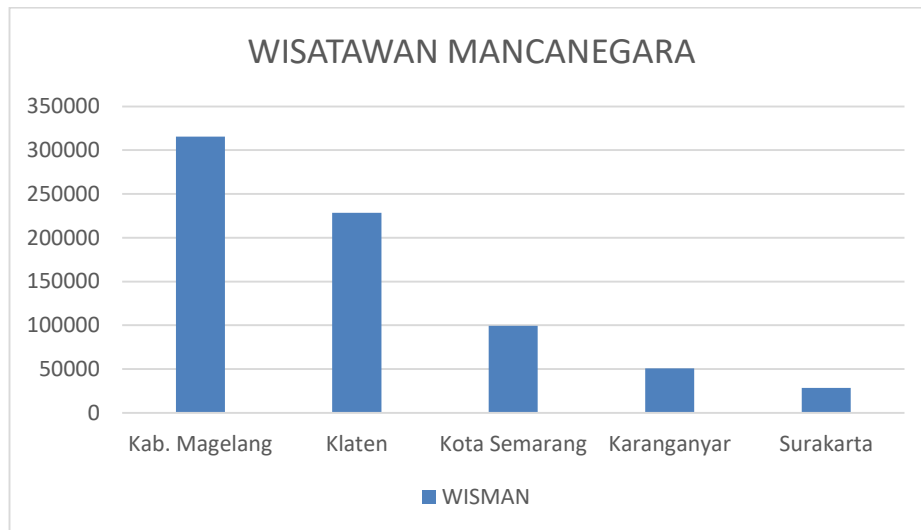
**Tabel 1.1**  
**Jumlah kunjungan wisata ke Jawa Tengah Pada tahun 2017**

<b>Wisnus Total</b>	<b>40.118.470</b>
<b>5 Besar:</b>	
<b>1. Kota Semarang</b>	4.198.584
<b>2. Surakarta</b>	3.843.353
<b>3. Magelang</b>	3.565.856
<b>4. Kab. Semarang</b>	2.699.328
<b>5. Jepara</b>	2.132.073

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

**Tabel 1.2**

**Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Jawa Tengah Tahun 2017**



Wisman Total		781.107
5 Besar:		
1. Kab. Magelang		315.459
2. Klaten		228.457
3. Kota Semarang		99.282
4. Karanganyar		50.594
5. Surakarta		28.322

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan pariwisata berkaitan dengan tingkat terhadap perekonomian yang dicapai suatu negara. Semakin tingginya tingkat dari sebuah perekonomian suatu negara yang dicapai, maka kegiatan kepariwisataan di negara tersebut akan relatif rendah dibanding dengan negara-negara yang mempunyai tingkat perekonomian

yang lebih rendah dan semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula bagian yang disisihkan untuk berpariwisata. Dengan semakin meningkatnya perekonomian saat ini, maka peran pariwisata dalam mendorong perekonomian juga akan semakin tinggi.

Dalam sebuah pembangunan nasional sektor kepariwisataan sangatlah berperan, sebagai sumber tambahan penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan peluang kerja serta pendapatan bagi masyarakatnya. Pajak pembangunan yang diperoleh dari sektor ini menjadi tumpuan pendapatan asli daerah (PAD). Pembangunan pada hakekatnya adalah pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan, maka pembangunan pariwisata adalah salah satu usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Beberapa daerah di Indonesia, industri pariwisata sering dianggap sebagai alternatif untuk menghadapi masalah perekonomian Indonesia melalui peningkatan pendapatan daerah. Kota Semarang, yang sampai saat ini masih menjadi daerah dengan besar nilai PDRB tertinggi se-provinsi Jawa Tengah.

Semarang merupakan Ibu Kota Jawa Tengah. Kota Semarang yang memiliki beberapa objek wisata seperti wisata kuliner, wisata religi, serta objek wisata bersejarah yang mampu menarik para wisatawan dengan jumlah yang lumayan besar. Pada tahun 2015 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), wisatawan yang berwisata berjumlah 33,452,034 wisatawan. Berbicara mengenai objek wisata, Kota Semarang memiliki beberapa alternatif pilihan objek wisata mulai dari wisata alam ataupun bangunan bersejarah, contohnya Lawang Sewu.

Dengan kekayaan Pariwisata yang dimiliki Kota Semarang seharusnya Kota Semarang mampu bersaing dengan kota lain sebagai Kota Destinasi Wisata, tidak hanya sebatas menjadi kota transit namun Kota Semarang juga seharusnya mampu menjadi kota destinasi wisata secara nasional maupun internasional. Keuntungan lain yang didapat sekaligus adalah membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat, peningkatan sektor industri pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

Kota Semarang sendiri memiliki objek wisata yang cukup terkenal dan menjadi salah satu tujuan wisata di Kota Semarang antara lain, Objek wisata Museum Lawang Sewu, Masjid Agung Jawa Tengah, Museum Ronggo Warsito, Klenteng Sam Poo Kong dan masih banyak lagi objek wisata yang masih dalam proses pengembangan.

Salah satu objek wisata yang terkenal di Semarang adalah Lawang Sewu. Pada saat ini objek wisata Museum Lawang Sewu telah direnovasi atau diperbaiki oleh PT. KAI demi menjaga unsur kesejahteraan dari objek wisata Museum Lawang Sewu. Mendapat julukan Lawang Sewu (pintu seribu) sebab mempunyai begitu banyak pintu dan busur-busur yang mengesankan rongga. Juga merupakan salah satu saksi bisu dari sejarah Kota Semarang yang masih berdiri hingga saat ini (Soerjonosoepomo, 1979: 24).

Kota Semarang sejak awal berdirinya sudah dikenal sebagai kota pantai yang memiliki banyak kekhasan, khususnya dalam seni bangunan dan arsitektur.



Sebagian besar merupakan bangunan dan arsitektur peninggalan bangsabangsa asing seperti Tionghoa, Arab atau Persia, India dan Belanda.

Dengan berkembangnya kota, satu demi satu bangunan tersebut mulai hilang akibat dirobohkan dan dibongkar serta diganti dengan bangunan baru yang lebih modern. Tercatat selama kurun waktu sepuluh tahun belakangan ini sudah 18 bangunan cagar budaya yang hilang. Hal ini sangat mengkhawatirkan banyak pihak, padahal Pemerintah Kota Semarang sudah memiliki kebijakan untuk melindungi bangunan-bangunan tersebut. Kebijakan mengenai perlindungan bangunan sudah dituangkan dalam SK Walikota Semarang Nomor 646/50/ 1992 tentang Konservasi Bangunan-bangunan Kuno/Bersejarah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang melindungi 101 bangunan dan Undang-Undang No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Berbagai tempat yang bersejarah tersebut harus tetap menjalankan pelestarian guna melindungi dan juga merawat tempat dan juga benda-benda bersejarah agar dapat terlihat utuh. Awal dari pelestarian melakukan konservasi, yaitu upaya dalam melestarikan dan melindungi sekaligus memanfaatkan sumber daya dari suatu tempat dengan adaptasi terhadap fungsi baru, tanpa menghilangkan makna kehidupan budaya (Nia Kurniasih Pontoh, 1999:36-37).

Lawang Sewu atau juga dikenal dengan bangunan yang bersejarah, yang pada saat ini telah diperbaiki atau direnovasi PT. KAI sehingga menjadi lebih baik dan tetap terjaga unsur kesejarahannya. Di lain sisi, pembenahan sarana yang dilakukan oleh PT. KAI masih kurang baik. Sehingga kurang memaksimalkan daya

tarik wisatawan untuk berkunjung, baik dari segi penjelasan ruangan, fasilitas, lingkungan, atau bahkan penunjuk arah seperti *sign system*.

Tingginya minat wisatawan dalam mengunjungi lawang sewu merupakan prestasi yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang maupun Pengelola Museum Lawang Sewu yaitu PT. Kereta Api dalam mengelola lawang sewu sehingga dapat menjadi lebih bagus dan menarik di mata pengunjung untuk datang berwisata ke lawang sewu. Hal ini menjadi prestasi karena minat wisatawan terhadap wisata museum di era *modern* sekarang ini terbilang rendah. Dibanding dengan museum-museum lain, objek wisata Museum Lawang Sewu memiliki popularitas yang tinggi. Pada tahun 2015 hingga tahun 2018 objek wisata Lawang Sewu mampu melampaui jumlah wisatawan hingga ratusan ribu wisatawan.

**Tabel 1.3**

**Jumlah Pengunjung Lawang Sewu pada tahun 2015 – 2018**



No	Tahun	Jumlah Wisatawan
1	2015	688.995
2	2016	861.918
3	2017	992.347
4	2018	1.104.554
5	2019	1.388.005

Sumber: PT. Kereta Api Pariwisata 2015 – 2019

Berdasarkan tabel 1.3, jumlah wisatawan objek wisata lawang sewu mengalami kenaikan yang pesat sejak tahun 2015, bahkan pada akhir tahun 2019 pengunjung objek wisata Museum Lawang Sewu menyentuh angka sebanyak 1.388.005 pengunjung.

**Tabel 1.4**

**Kegiatan tahunan di objek wisata Museum Lawang Sewu**

No.	Nama Kegiatan
1	UMKM goes to Museum Lawang Sewu di masa libur lebaran
2	UMKM goes to Museum Lawang Sewu di masa libur Natal dan Tahun Baru
3	Peringatan Hari Ulang Tahun PT. Kereta Api Indonesia
4	Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia
5	Hari Museum Nasional

Sumber: PT. Kereta Api Pariwisata

Berdasarkan tabel 1.4, semenjak tahun 2017 kegiatan tahunan yang dilaksanakan di Museum Lawang Sewu tidak mengikutsertakan Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena kesalah pahaman antara

kedua belah pihak, dimana pihak Pemerintah Kota Semarang, sebenarnya ingin mengadakan event-event maupun program wisata di objek wisata tersebut, namun menurut Pemerintah Kota Semarang, menganggap bahwa harga sewa di objek wisata Museum Lawang Sewu dinilai terlalu mahal. Pernyataan tersebut bantah oleh Pengelola Musuem Lawang Sewu, pihak Lawang Sewu beranggapan jika Pemerintah Kota Semarang ingin mengadakan program pariwisata harus bisa mendatangkan dampak positif bagi objek wisata itu sendiri, bukan hanya mendatangkan wisatawan, namun juga mendatangkan pemasukan bagi Museum Lawang Sewu yang digunakan nantinya untuk biaya pemeliharaan gedung yang cukup mahal.

Implementasi pengembangan dan pengelolaan museum lawang sewu sebagai destinasi wisata di Kota Semarang yang dilakukan oleh PT KAI DAOP IV dibidang cukup berhasil, dilihat dari jumlah wisatawan yang meningkat disetiap tahunnya. Meskipun meningkatnya jumlah pengunjung tetapi masih ada hambatan dalam pengembangan dan pengelolaan museum lawang sewu seperti minimnya anggaran yang dimiliki oleh PT KAI DAOP IV Semarang dalam melestarikan objek wisata Museum Lawang Sewu, masih kurangnya staf pengelola objek wisata, belum adanya aplikasi atau media sosial yang memberikan informasi khusus tentang lawang sewu, masih kurangnya kesadaran masyarakat sekitar tentang pentingnya perlindungan bangunan bersejarah objek wisata Museum Lawang Sewu dan masih belum maksimalnya aplikasi-aplikasi kebijakan pemerintah, dan juga masih lemahnya aturan-aturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai apa saja faktor-faktor pendukung Implimentasi Pengelolaan serta pengembangan yang menyebabkan tingginya kunjungan terhadap Objek Wisata Museum Lawang Sewu di Kota Semarang. Hal tersebutlah yang menyebabkan perlu adanya studi terkait dengan Pelaksanaan Pengelolaan dan pengembangan di objek wisata Museum Lawang Sewu yang dikelola oleh PT. Kereta Api Pariwisata terkait dengan dampaknya terhadap kenaikan wisatawan di objek wisata Museum Lawang Sewu Kota Semarang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apa saja faktor-faktor pendukung proses implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Yang menyebabkan tingginya Kunjungan terhadap Objek Wisata Lawang Sewu Semarang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dari proses implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Yang menyebabkan tingginya Kunjungan terhadap Objek Wisata Lawang Sewu Semarang.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai teori-teori kebijakan publik terutama implementasi kebijakan pariwisata pada instansi dan Pengelola wisata terkait dan masyarakat maupun wisatawan secara luas.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran sekaligus kontribusi yang nyata dan dapat dijadikan rekomendasi bagi masalah tentang implementasi program kepariwisataan yang ada di Kota Semarang.

### b. Bagi peneliti

Tempat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan penelitian ilmiah serta dapat meningkatkan kemampuan bagi peneliti dalam memahami fenomena dan permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

### c. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Semarang mengenai teori-teori administrasi publik.

### d. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama masa perkuliahan.

## 1.5 Kajian Teori

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.5**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Jurnal	Pengarang	Tujuan	Temuan
1	2	3	4	5
1.	<i>Strategi implementation research in hospitality and tourism: Current status and future pontential</i>	Omer Faruk Aladaga, Mehmet Ali Köseoglu, Brian King, Fuad M ehraliyevc.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi literatur implementasi dalam pariwisata dan perhotelan.	Penelitian ini telah memberikan tinjauan literatur sistematis tentang strategi pelaksanaan penelitian di bidang pariwisata dan perhotelan, dan telah disajikan pemilihan dan analisis 139 artikel yang diterbitkan selama periode 1986–2019. Dengan melakukan analisis literatur, kami telah mengidentifikasi lima kelompok topik dan empat kesenjangan utama dalam literatur implementasi strategi dalam perhotelan dan pariwisata.

1	2	3	4	5
2.	<p><i>Challenges in National-level Tourism Strategi Implementation – A Long-term Perspective on the New Zealand Tourism Strategy 2015</i></p>	<p>Julia Nina Albrecht</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang implementasi tantangan yang dihadapi termasuk dilema yang terkait dengan jenis dan jumlah pemangku kepentingan terlibat dalam implementasi strategi, tujuan strategi itu sendiri dan masalah sistematis yang melekat dalam kolaborasi sektor public swasta . Makalah ini diakhiri dengan pertimbangan praktis dan implikasi konseptual untuk strategi pariwisata masa depan.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah semua pemangku kepentingan dalam implementasi strategi (apalagi menemukan yang tepat seseorang untuk mengisi peran itu). Baik analisis jaringan sosial dan Wawancara kualitatif menyarankan kolaborasi dan pemangku kepentingan Keterlibatan industri sangat penting untuk setiap Pariwisata Selandia Baru Strategi untuk berhasil. Sangat cocok maka upaya terbaru di perencanaan strategis untuk pariwisata di Selandia Baru telah dimulai dan disiapkan oleh TIANZ. Seperti yang diharapkan dari industri yang digerakkan proses perencanaan strategis, sebagian besar dokumen</p>



				fokus pada pertumbuhan, daya saing dan produktivitas. Masih harus dilihat apakah ini Pendekatan ini memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pariwisata dan manajemen pariwisata di Indonesia Selandia Baru sehingga mengarah pada yang kuat, ulet dan berkelanjutan industri pariwisata.
1	2	3	4	5
3.	<i>Tourism development after the implementation of sustainable strategies in Neamt Country</i>	Stefania Bodoscaa, dan Mihnea Diaconescua	Maksud dari penelitian ini adalah guna mengetahui serta mengidentifikasi berbagai faktor yang yang dapat menghambat pengembangan warisan budaya Neamt County dan juga untuk mengetahui kesimpulan tentang seluruh proses pembangunan berkelanjutan. Sebagai fokus penelitian, penelitian ini membawa diskusi komunitas dan	Hasil atau temuan dari penelitian ini adalah pengembangan pariwisata berkelanjutan dihadapkan dengan beberapa hambatan seperti prioritas kebijakan ekonomi nasional, struktur administrasi publik dan interkoneksi antara kementerian yang berbeda. Karena tidak ada statistik untuk pengeluaran perjalanan untuk

			keterlibatannya dalam pelestarian dan integrasi warisan budaya.	pengunjung budaya dan warisan, penelitian ini dianalisis hanya atraksi budaya yang mewakili nilai-nilai warisan. Kita bisa menyimpulkan itu meski prinsipnya pengembangan pariwisata berkelanjutan sangat berharga dan bermanfaat pemberlakuan dan transfernya ke dalam praktik adalah tugas yang melibatkan biaya keuangan substansial yang sangat sulit untuk didanai dan ditutup dengan tetap menjaga keseimbangan anggota masyarakat dan pembuat keputusan politik.
1	2	3	4	5
4.	<i>Implementation Strategies of Low-Carbon Tourism.</i>	Yingfa Yang.	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan referensi untuk pelaksanaan pembangunan pariwisata rendah karbon.	Temuan dari penelitian ini adalah dengan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat, dengan pertumbuhan ekonomi, banyak kota di China menghadapi

				<p>masalah yang serius mengenai pencemaran lingkungan seperti asap tebal. Dengan demikian, lingkungan lowcarbon telah menjadi masalah yang mendesak. Pariwisata sebagai industry yang terkait erat dengan sumber daya alam, penerapan pariwisata rendah karbon sangat penting untuk perlindungan sumber daya lingkungan. Makalah ini telah memberikan gambaran mengenai definisi pariwisata rendah karbon, evaluasi sistem pariwisata rendah karbon, dan juga langkah-langkah yang kolektif untuk menerapkan pariwisata rendah carbon, yaitu untuk memperkuat mekanisme dan rencana pariwisata rendah karbon, dan untuk mempromosikan publikasi</p>
--	--	--	--	---

				kesadaran karbon rendah.
1	2	3	4	5
5.	<i>Challenges in Tourism strategy Implementation in Peripheral Destination— The Case of Stewart Island, New Zealand</i>	Julia Nina Albrecht	Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti implementasi strategi pariwisata di Pulau Stewart, Selandia Baru.	Temuan dari penelitian ini adalah tantangan implementasi yang diidentifikasi termasuk masalah yang berkaitan dengan kontrol atas lingkungan implementasi, keterlibatan sukarelawan dan tingkat rendah dukungan pemerintah. Sifat perencanaan yang kebetulan di tingkat masyarakat menambah kekurangan kontrol atas hasil potensial dari manajemen pariwisata di destinasi pinggiran.
1	2	3	4	5
6.	Implementasi Rencana Strategi Pengembangan dan Pelestarian Destinasi Wisata Cagar Budaya Banten Lama di Dinas Kebudayaan dan	Fani Mutia Hanum	Tujuan dari Penelitian ini guna untuk mengetahui bagaimana implementasi dari rencana strategis pembangunan dan pelestarian destinasi wisata Banten Lama di	Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi rencana strategis pembangunan dan pelestarian destinasi wisata

	Pariwisata Provinsi Banten		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.	cagar budaya Banten Lama dikatakan masih belum terlalu baik, Dinsa Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten hanya memperioritaskan Banten Lama dalam rencana strategis dinas tahun 2012-2017, namun dalam pelaksanaannya sejak tahun 2012- 2014 belum ada kegiatan kearah pengembangan Banten Lama karena beberapa masalah seperti masalah kepemimpinan, kewarganegaraan dan juga masalah anggaran pengembangan. Banten Lama oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten baru akan dilakukan pada tahun 2015 saja.
1	2	3	4	5
7.	Implementasi Strategi Pengembangan Wisata Kebun Binatang Surabaya Sebagai Destinasi Wisata	Muhammad Irsyad, Djamhur Hamid, M. Kholid Mawardi.	Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui dan juga menjelaskan strategi Kebun Binatang Surabaya,	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tiga strategi yang diterapkan oleh Kebun binatang Surabaya yaitu strategi dalam

	di Kota Surabaya.		implementasi strategi serta beberapa faktor yang menjadi pendukung dan juga penghambat dari sebuah implementasi.	meningkatkan atraksi atau produk-produk pariwisata di Kebun Binatang Surabaya yang tetap memperhatikan etika dan kesejahteraan dari satwa, mewujudkan promosi Kebun Binatang Surabaya yang berorientasi pada efektifitas, efisiensi, dan tepat sasaran, mengoptimalkan berbagai upaya penguatan dan perluasan jaringan kerjasama serta meningkatkan kemitraan.
1	2	3	4	5
8.	Strategi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.	Jabal Arafah, Entang Adhy Muhtar, A. Djadja Saefullah, Didin Muhafidin.	Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa belum ada strategi dalam implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan yang dimunculkan oleh pemerintah daerah.	Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Aspek komunikasi yaitu tidak adanya komunikasi intensif antara pengelola obyek wisata dengan pemerintah daerah (kabupaten) dan DPRD setempat. 2. Aspek sumberdaya

				<p>dalam hal ini sumber daya manusia yaitu tersedianya pengelola yang siap menjalankan tugasnya tetapi tidak didukung dengan fasilitas untuk usaha pengembangan kepariwisataan agar semakin meningkatkan jumlah pengunjung.</p> <p>3. Aspek sikap pelaksana adalah para pelaksana/pengelola di area wisata sudah menjalankan beberapa tugas dan fungsinya dengan baik tetapi mereka masih merasakan kurangnya perhatian pemerintah daerah setiap tahunnya, dalam upaya strategi pengembangan kepariwisataan daerah.</p> <p>4. Struktur birokrasi, khususnya pada kantor dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata</p>
--	--	--	--	---

				menunjukkan keadaan yang lebih baik karena kompetensi skill dan bidang ilmu kepariwisataan.
1	2	3	4	5
9.	Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Cijulang.	Anita Sri Hastuti.	Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi strategi pengembangan kawasan wisata, hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam implementasikan strategi pengembangan kawasan wisata dan juga upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasikan strategi pengembangan kawasan wisata.	Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Implementasi strategi pengembangan kawasan wisata belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan UPTD Pariwisata dan Kebudayaan belum mampu melaksanakan tingkatan strategi yang disebut dengan master strategi. 2. Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan seperti kurangnya kreatifitas untuk mengembangkan kebudayaan setempat, kurang memahami strategi dalam mengembangkan kepariwisataan, kurangnya tim ahli, kurangnya dukungan modal dan sarana prasarana, rumitnya



				<p>prosedur kerjasama terhadap pihak swasta untuk bekerjasama, kurangnya ketegasan dari pemerintah Daerah terkait dengan perusakan alam.</p> <p>3. Adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti melakukan diskusi dengan kompepar dan kelompok pemuda seni, pengarahan dan pembinaan terhadap anggota kompepar agar lebih kreatif, membentuk tim ahli agar dapat diturunkan langsung kelapangan, memangkas prosedur untuk memberikan perizinan terhadap pihak swasta.</p>
1	2	3	4	5
10.	Implementasi Strategi Pada Pengembangan Wisata Dieng	Nurlaili Restiana, Denok Kurniasih,	Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apa permasalahan	Hasil yang ditemukan dari penelitian yaitu diketahui bahwa implementasi

	Kabupaten Banjarnegara.	Muslih Faozainudin.	dalam pengelolaan Wisata Dieng.	strategi pengembangan kawasan wisata Dieng di Kabupaten Banjarnegara secara umum sudah berjalan dengan cukup baik dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu program, sumber daya, dan prosedur. Penelitian ini juga menemukan bahwa program pengembangan destinasi pariwisata dan sumber daya teknologi mampu mendukung pengembangan wisata Dieng. Namun masih ada kekurangan dalam aspek sumber daya yaitu sumber daya keuangan masih terbatas dari APBD dan masih ada sumber daya fisik yang belum memadai.
1	2	3	4	5
11.	Implementasi Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pariwisata Berbasis Budaya Terkemuka	Eva Rusdiananingtyas, Heru Ribawanto, Wima Yudo Prasetyo.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pembangunan pariwisata DIY.	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat tiga strategi yang diterapkan Dinas Pariwisata DIY yaitu strategi

	(Studi pada Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).			meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, strategi mewujudkan pemasaran yang efektif dan efisien, serta strategi pengoptimalan perluasan jaringan kerjasama.
1	2	3	4	5
12.	Strategi dan Implementasi Pengembangan Destinasi Pariwisata (Studi Kasus pada Wisata Waduk Gondang dan Wisata Religi Sunan Drajat Kabupaten Lamongan).	Rizal Wafi, Djamhur Hamid, Arik Prasetya.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan dalam pengembangan Wisata Waduk Gondang dan Wisata Religi Sunan Drajat Kabupaten Lamongan.	Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah: 1. Kurangnya pengembangan potensi wisata waduk gondang dan wisata religi sunan drajat 2. Strategi pengembangan pariwisata terdiri dari: strategi pengembangan produk, strategi pengembangan pasar dan promosi, strategi Sumber Daya Manusia, strategi pemanfaatan ruang untuk pariwisata, strategi investasi, dan strategi pengelolaan lingkungan.

				<p>3. Perlu adanya analisa yang mendalam pengambilan keputusan</p> <p>4. Perlunya mensosialisasikan hambatan-hambatan yang ada dan juga meningkatkan sarana dan prasaran pada kedua objek wisata.</p>
	<p>Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Dalam Upaya Mengembangkan Pariwisata Kota Semarang.</p>	<p>Mayang Vini Setyadengan.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan sesungguhnya yang terjadi tentang bagaimana pelaksanaan strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam usaha mengembangkan pariwisata Kota Semarang.</p>	<p>Hasil atau temuan dari penelitian ini adalah Strategi yang dilakukan sudah berhasil diantaranya adalah dalam meningkatkan apresiasi seni budaya tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam meningkatkan profesionalisme SDM kepariwisataan. Pelaksanaan strategi lainnya belum maksimal dikarenakan ditemukan hambatan-hambatan.</p>

1	2	3	4	5
13.	Implementasi Strategi Pemanfaatan Taman Nasional Way Kambas Dalam Mendukung Pariwisata di Provinsi Lampung (Studi Pada Balai Taman Nasional Way Kambas).	Putri Wijayanti.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi dari pemanfaatan Taman Nasional Way Kambas dalam mendukung pariwisata di Provinsi Lampung dan juga apa saja kendala yang dihadapi oleh Balai Taman Nasional Way Kambas dalam upaya pengimplementasian strategi tersebut.	Temuan dari hasil penelitian ini adalah tahap perencanaan strategi sudah direncanakan dengan baik tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak kekurangan yang menyebabkan belum adanya dampak pada kenaikan jumlah kunjungan wisatawan. Pada tahap implementasi strategi pengorganisasian masih adanya tumpang tindih pekerjaan yang dibebankan hanya kepada satu orang saja. Pada tahap implementasi strategi pengendalian yang dilakukan adalah evaluasi jangka panjang yakni enam bulan sekali. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi implementasi adalah kurangnya komunikasi dan

				masih terdapat tumpang tindih pekerjaan sehingga membuat pelaksanaan tidak maksimal.
--	--	--	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa mayoritas peneliti terdahulu menjelaskan mengenai faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam menentukan keberhasilan implementasi yang juga akan peneliti bahas terkait Faktor-faktor Pendukung Implementasi Yang Menyebabkan Tingginya Kunjungan Terhadap Objek Wisata Museum Lawang Sewu di Kota Semarang. Teori yang digunakan oleh penelitian sebelumnya menggunakan teori implementasi sebagai acuan guna mengolah hasil penelitian yang diamati di lapangan. Dalam penelitian yang penulis teliti akan menggunakan konsep implementasi yang diutarakan oleh George Edward. Teori ini nantinya akan membantu penulis untuk lebih mendalami terkait Faktor-faktor Pendukung Implementasi Yang Menyebabkan Tingginya Kunjungan Terhadap Objek Wisata Museum Lawang Sewu di Kota Semarang.

## **1.5.2 Administrasi Publik**

### **1.5.2.1 Konsep Administrasi Publik**

John M Pfiffner and Robert V Presthus dalam Inu Kencana (2010:23-24) menjelaskan pengertian administrasi publik adalah sebagai berikut:

- (1) Administrasi Publik meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
- (2) Administrasi Publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
- (3) Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan

kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahannya, kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhitung jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Dimock, Dimock & Fox, administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi tersebut melihat administrasi publik sebagai kegiatan ekonomi, atau serupa dengan bisnis tetapi khusus dalam menghasilkan barang dan pelayanan publik.

Nicholas Henry dalam Keban (2014:6) mendefinisikan administrasi publik sebagai:

Suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat.

Nigro & Nigro dalam Mariati Rahman (2017:19) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah :

Usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan definisi dari ahli, maka dapat disimpulkan administrasi publik merupakan suatu seni atau ilmu dalam lingkup pemerintahan yang mencakup yudikatif, legislatif, dan eksekutif yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama dibidang manajemen publik dan kebijakan publik.

### 1.5.2.2 Paradigma

Menurut (Kuhn, 1970) paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Apabila suatu cara pandang tertentu mendapatkan tantangan dari luar dan mengalami krisis atau *anomalies*, Maka kepercayaan dan wibawa dari cara pandang tersebut akan luntur atau berkurang. Orang mulai mencari cara pandang yang lebih sesuai, atau dengan kata lain muncul paradigma baru.

Nicholas Henry mengungkapkan bahwa standar suatu disiplin ilmu, seperti yang dikemukakan oleh Robert T. Golembiewski, mencakup focus dan locus. Focus mempersoalkan metode dasar yang digunakan atau cara-cara ilmiah apa yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu persoalan. Sedang locus mencakup medan atau tempat dimana metode tersebut digunakan atau diterapkan. Berdasarkan dua kategori disiplin tersebut, Henry mengungkapkan bahwa telah terjadi lima paradigma dalam administrasi negara, yang seperti diuraikan berikut ini.

Paradigma 1 (1900-1926) dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh-tokoh dari paradigma tersebut adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow dalam tulisannya yang berjudul “Politics dan Administration” pada tahun 1900 mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresikan kehendak rakyat



dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Badan yudikatif dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Implikasi dari paradigma tersebut adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Dalam paradig ini hanya ditekankan aspek “locus” saja yaitu *government bureaucracy*, tetapi *Focus* atau metode apa yang harus dikembangkan dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

Paradigma 2 (1927-1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Tokoh-tokoh terkenal dari paradig ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai focus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizaing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting and Budgeting*) yang menurut mereka dapat diterapkan dimana saja, atau bersifat universal. Sedang lokus dari administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk di organisasi pemerintah. Dengan demikian, dalam paradigma ini, focus lebih ditekankan dari pada lokusnya.

Paradigma 3 (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Morstein-Marx seorang editor buku “*Elements of Public Administration*” di tahun 1946 mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis, sementara

Herbert Simon mengarahkan kritiknya terhadap ketidak-konsistenan prinsip administrasi, dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal. Dalam konteks ini, administrasi negara bukannya *value free* atau dapat berlaku dimana saja, tapi justru selalu dipengaruhi nilai-nilai. Disini terjadi pertentangan antara anggapan mengenai *value-free administration* di satu pihak dengan anggapan akan *value-laden politics* di lain pihak. Dalam praktek ternyata anggapan kedua yang berlaku, karena itu Jhon Gaus secara tegas mengatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik. Akibatnya muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedang fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Sayangnya, mereka yang mengajukan kritikan terhadap prinsip-prinsip administrasi tidak memberi jalan keluar tentang fokus yang dapat digunakan dalam administrasi publik. Perlu diketahui bahwa pada masa tersebut administrasi publik mengalami krisis identitas kerana ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik.

Paradigma 4 (1956-1970) adalah Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dsb., merupakan fokus paradigma ini. Dua arah perkembangan ilmu administrates murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus yang

dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi publik. Karena itu, locusnya menjadi tidak jelas.

Paradigma 5 (1970- sekarang) merupakan paradigma terakhir yang disebut sebagai Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma tersebut telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik; sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

Dalam penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma yang digunakan adalah paradigma 5, karena paradigma 5 sudah memiliki fokus dan lokus yang jelas, dalam penelitian ini fokus pada implementasi terhadap pengelolaan dan pengembangan objek wisata museum lawang sewu sedangkan lokusnya berada di Kota Semarang. Dalam paradigma 5 ini memiliki fokus pada teori kebijakan publik.

### **1.5.3 Kebijakan Publik**

#### **1.5.3.1 Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh seorang pejabat yang berwenang.

Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya, menjadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Beberapa orang pakar memeberikan pengertian terhadap kebijakan publik antara lain sebagai berikut:

Kebijakan publik menurut Tomas R. Dye (1981) adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*).

Menurut Willy N. Dunn, kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh Lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Menurut Carl Friedrich, kebijaksanaan pemerintah ini adalah suatu usulan tindakan oleh seseorang, keluarga, atau pemerintah pada suatu lingkungan politik tertentu, mengenai hambatan dan peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan oleh suatu kebijaksanaan, dalam mencapai suatu tujuan atau meeralisasikan suatu maksud.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Berdasarkan penjelasan menurut ahli mengenai kebijakan publik, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memecahkan masalah publik atau demi kepentingan publik. Dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu mulai dari merumuskan sampai akhirnya melaksanakan kebijakan itu sendiri.

### **1.5.3.2 Tujuan Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau *resources*, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan men-distribusi sumber daya negara dari yang bertujuan menyerap sumber daya negara.

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.

### **1.5.3.3 Tahap-tahap Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu

beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

### 3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

### 4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

### 5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

## **1.5.4 Implementasi Kebijakan Publik**

### **1.5.4.1 Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Dalam Budi Winarno (2007), terdapat beberapa pengertian implementasi kebijakan menurut ahli, antara lain :

- a. Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).
- b. Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.



- c. Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier, 1986: 21-48). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan penjelasan menurut para ahli terkait implementasi kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan dimana implementor harus menjalankan suatu kebijakan yang telah dirumuskan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik.

### 1.5.4.2 Model Implementasi Kebijakan Publik

#### George C. Edward

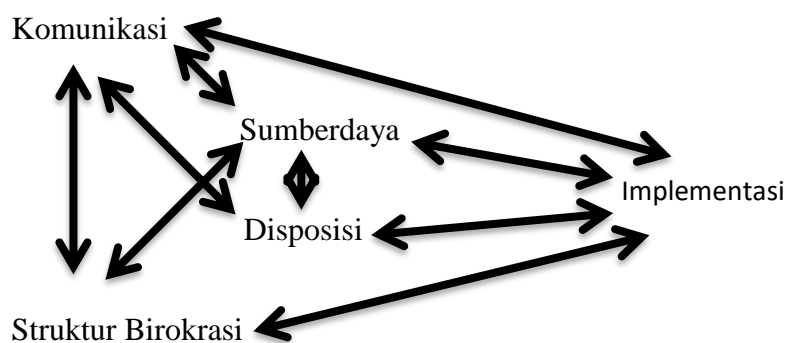
Model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diteoremdakan oleh Edward III, terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

#### 1. Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka melaksanakan keputusan-keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

**Gambar 1.1**

**Model Implementasi George Edward III**



Sumber : Edward III dalam Subarsono (2011:91)

Edward secara umum membahas tiga hal penting yang dapat digunakan dalam proses komunikasi. Edward III (Winarno, 2012:178) mengemukakan tiga hal tersebut yakni:

a. Transisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidur di tengah jalan.

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya

Edwards III (1980:11) mengategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : *“Staff, information, , facilities; building, equipment, land and supplies”*.

Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan;

*“Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed “.*

“Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi”. (Tachjan, 2006:135)

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 3. Disposisi (kecenderungan-kecenderungan)

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan

perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

#### 4. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam Organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di Institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan model implementasi Edward dalam menjelaskan tentang bagaimana implementasi pengelolaan objek wisata museum lawang sewu Kota Semarang dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses implemementasi, karena menurut peneliti keberhasilan implementasi kebijakan memiliki syarat agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Faktor komunikasi menunjukkan peran sebagai acuan agar para pelaksana kebijakan tahu persis apa yang akan mereka kerjakan atau dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap para pelaksana kebijakan sehingga pelaksanaannya sesuai apa yang telah dikehendaki. Dengan demikian komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten tetapi apabila para pelaksana kebijakan tidak memiliki sumberdaya untuk

melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan baik. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia dan sumberdaya financial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan baik.

Disposisi sendiri merupakan karakteristik dari seorang implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai keinginan pembuat kebijakan, sehingga implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Sedangkan struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu implementasi kebijakan, salah satu contohnya adalah standar prosedur operasi.

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of policy implementation*. Proses implementasi ini merupakan abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Ada enam variable yang menurut Van Metter dan Van Horn , yang mempengaruhi implementasi adalah :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit



memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

## 2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan dari sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

## 3. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja Implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

## 4. Sikap/ kecenderungan ( disposition ) para pelaksana

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan

“dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

**Mirilee S. Grindle**

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan “*Implementation as a Political and Administrative Process*”. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu:

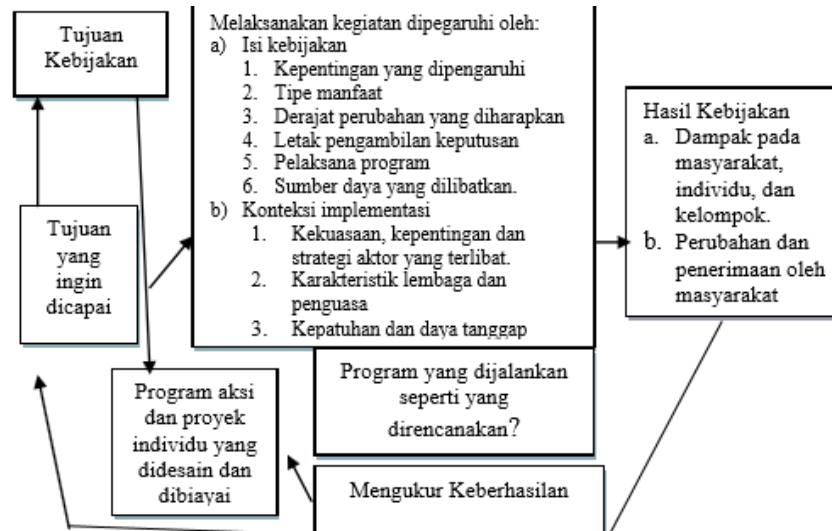
Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu,

keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) Isi kebijakan meliputi: (1) *interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2) *type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan, (3) *extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas, (4) *site of decision making*, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, (5) *program implementer*, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan (6) *resources committed*, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Isi implementasi meliputi :

- (1) *power, interest and strategy of actor involved*, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat;
- (2) *institution an regime characteristic*, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan
- (3) *compliance and responsiveness*, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

**Gambar 1.2**

**Model Implementasi maerilee S. Grindle**



Sumber : Grindle dalam Tahir (2011:114)

**Donald S. van Meter dan Carl E. van Horn**

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005: 99) menerapkan model implementasi dengan lebih memfokuskan ke sisi teknisnya. Menurut Meter dan Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, maka dari itu harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila terjadi kekaburan, maka yang akan terjadi adalah multiinterpretasi dan memudahkan timbulnya konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumber daya

Komunikasi Sumberdaya Implementasi Disposisi Struktur Birokrasi 20 Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial atau nonmanusia dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.

3. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan kordinasi dengan instansi lain

4. Karakteristik agen pelaksana

Birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompokkelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implemmentasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor

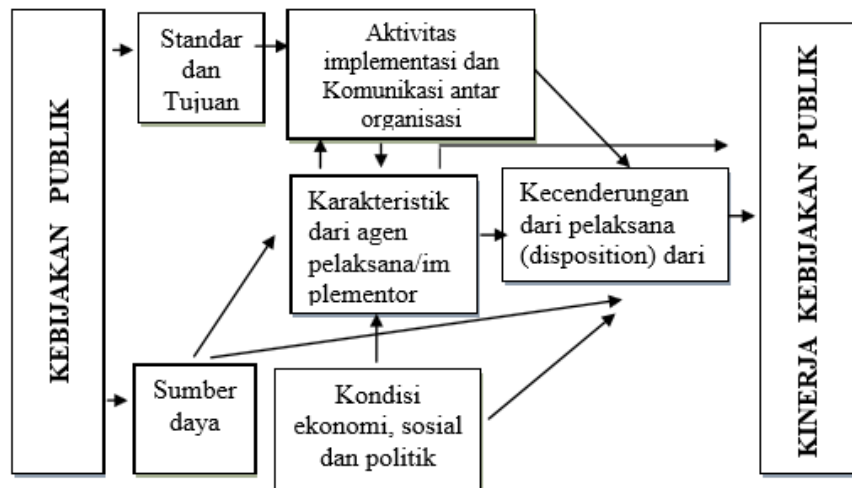
Disposisi implemmentor mencakup tiga hal yang penting, yakni :

- a. Respon implemmentor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan,
- b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan

- c. Intensitas disposisi implemendor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implemendor.

**Gambar 1.3**

**Model Implementasi Van Meter dan Van Horn**



Sumber : Van Meter dan Van Horn dalam Tahir (2011:112)

**Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier**

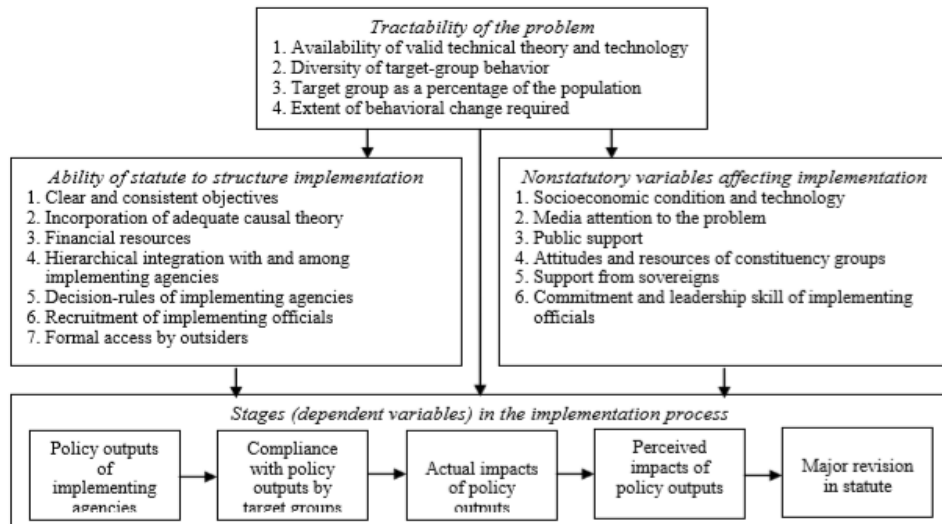
Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*) :
  - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
  - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
  - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
  - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) :

- a. Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata.
  - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
  - c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.
  - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.
  - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
  - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
  - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*) :
- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
  - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
  - c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).
  - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

**Gambar 1.4**

**Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier**



Sumber : Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2015:95)

**1.5.5 Pengertian Pariwisata**

Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Menurut Kodhyat (1998) pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.



Sedangkan Gamal (2002), pariwisata didefinisikan sebagai bentuk. suatu proses kepergian sementara dari seorang, lebih menuju ketempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan baik karena kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain.

Selanjutnya Burkart dan Medlik (1987) menjelaskan pariwisata sebagai suatu trasformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ketujuantujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatankegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.

Menurut WTO (1999), yang dimaksud dengan pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya.

Pariwisata menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### **1.5.5.1 Strategi Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Pengembvangan dalam penelitian ini dapat diartikan

sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemilik usaha, dan masyarakat dalam memperbaiki fasilitas pendukung atau melakukan pembangunan demi kemajuan wisata dalam rangka meningkatkan arus kunjungan wisata dan peningkatan pendapatan daerah disektor pariwisata.

M.J. Prajogo menyatakan bahwa negara yang sadar akan pengembangan pariwisata tertentu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan pengembangan pariwisata harus menyeluruh, sehingga seluruh segi pengembangan pariwisata diperhitungkan dengan memperhatikan pula perhitungan untung rugi apabila dibandingkan dengan pembangunan sektor lain. Jadi apabila pembangunan sektor lain lebih menguntungkan dari pembangunan sector pariwisata, maka pembangunan sector lain itu harus diutamakan. Dalam bidang pariwisata sendiri perlu dipertimbangkan apakah pengembangan jenis pariwisata tertentu lebih diutamakan dari jenis lainnya. Misalnya apakah “wisata komersial” yang lebih dikembangkan atau “wisata social”, yaitu suatu pendekatan pengembangan wisata yang lebih mengutamakan manfaat segi sosialnya dibandingkan segi komersial; misal, untuk meningkatkan prestasi kerja agar lebih mengenal tanah air, untuk persahabatan antarbangsa.
2. Pengembangan pariwisata harus diintegrasikan ke dalam pola dan program pembangunan semesta ekonomi, fisik dan social sesuatu negara. Karena pengembangan pariwisata saling berkait dengan sector lain dan dapat mempengaruhi pembangunan sektor lain.

3. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa, sehingga dapat membawakan kesejahteraan ekonomi yang tersebar luas dalam masyarakat.
4. Pengembangan pariwisata harus “sadar lingkungan”, sehingga pengembangannya mencerminkan ciri-ciri khas budaya dan lingkungan alam suatu negara, bukannya justru merusak lingkungan alam dan budaya yang khas itu. Pertimbangan utama harus mendayagunakan pariwisata sebagai sarana untuk memelihara kekayaan budaya, lingkungan alam dan peninggalan sejarah, sehingga masyarakat sendiri menikmatinya dan merasa bangga akan kekayaannya itu.
5. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa, sehingga pertentangan social dapat dicegah seminimal mungkin. Sedapat mungkin harus menampakkan perubahan-perubahan social yang positif.
6. Penentuan tata cara pelaksanaannya harus disusun sejelas-jelasnya berdasar pertimbangan-pertimbangan yang masak sesuai kemampuan.
7. Pencatatan (*monitoring*) secara terus-menerus mengenai pengaruh pariwisata terhadap suatu masyarakat dan lingkungan, akan merupakan bahan yang baik untuk meluruskan kembali akibat perkembangan pariwisata yang merugikan, sehingga merupakan sarana pengendalian pengembangan yang terarah.

Menurut Hadinoto (1996), ada beberapa hal yang menentukan dalam pengembangan suatu obyek wisata, diantaranya adalah:

- a. Atraksi Wisata

Atraksi merupakan daya tarik wisatawan untuk berlibur. Atraksi yang diidentifikasi (sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan

sebagainya) perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata. Tanpa atraksi wisata, tidak ada peristiwa, bagian utama lain tidak akan diperlukan.

b. Promosi dan Pemasaran

Promosi merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi merupakan bagian penting.

c. Pasar Wisata (Masyarakat pengirim wisata)

Pasar wisata merupakan bagian yang penting. Walaupun untuk perencanaan belum/ tidak diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun informasi mengenai trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi, dan sebagainya dari wisatawan perlu dikumpulkan dari mereka yang berlibur.

d. Transportasi

Pendapat dan keinginan wisatawan adalah berbeda dengan pendapat penyuplai transportasi. Transportasi mempunyai dampak besar terhadap volume dan lokasi pengembangan pariwisata.

e. Masyarakat Penerima Wisatawan yang Menyediakan Akomodasi dan Pelayanan Jasa Pendukung Wisata (fasilitas dan pelayanan).

Menurut Suwanto (1997), unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata meliputi :

a. Obyek dan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada :

1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
3. Adanya spesifikasi/ ciri khusus yang bersifat langka.
4. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan;
5. Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan dan lain- lain).
6. Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

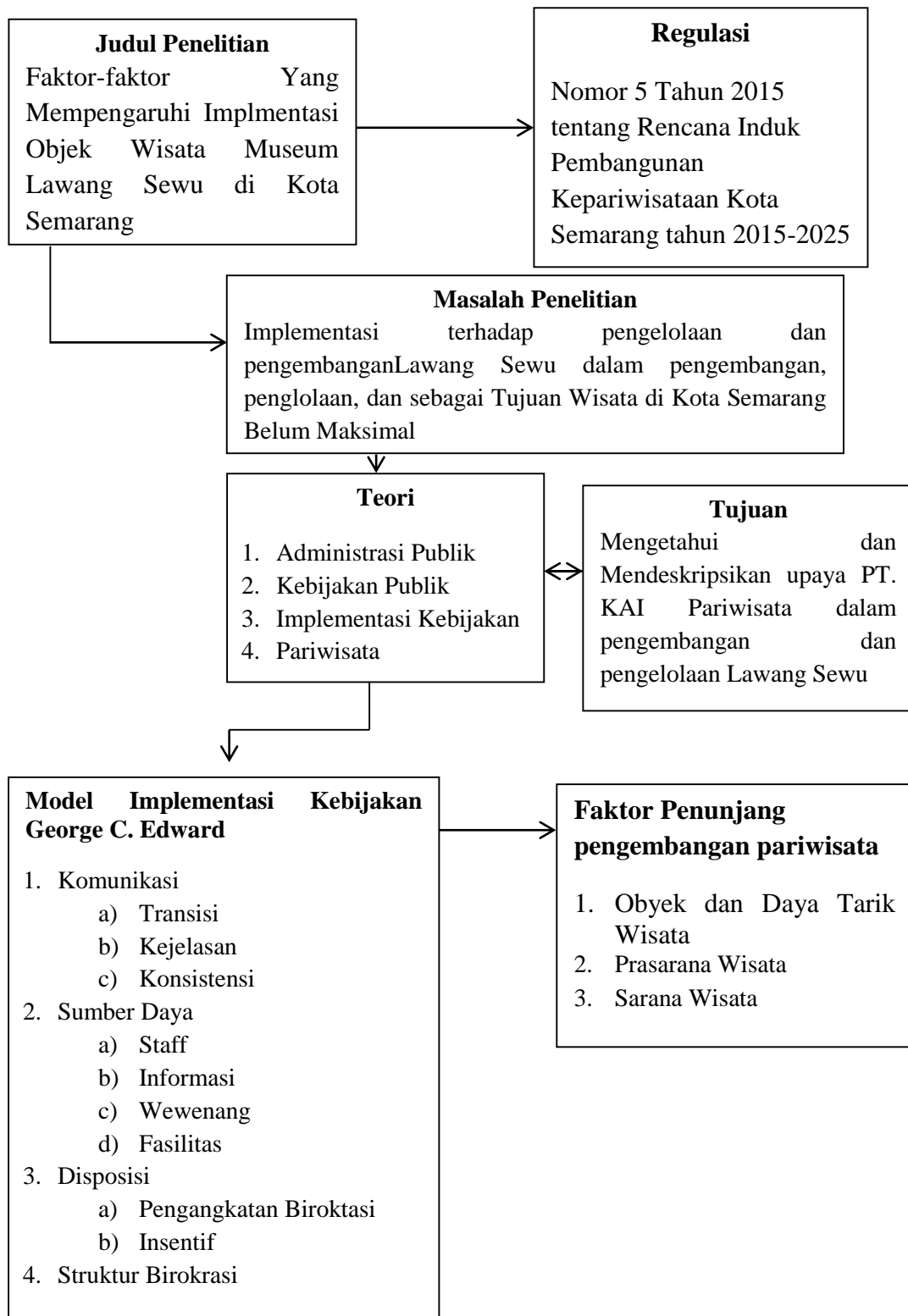
b. Prasarana wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya.

c. Sarana wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

## 1.6 Kerangka Pikir



## **1.7 Operasionalisasi Konsep**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Pengelolaan Objek Wisata Museum Lawang Sewu bertujuan untuk mengembangkan Objek Wisata Museum Lawang Sewu agar dapat menarik wisatawan untuk datang ke Kota Semarang, dan dapat menjadikan objek wisata Museum Lawang Sewu menjadi salah satu masukan bagi wisatawan untuk memilih objek wisatanya sehingga dapat menjadi perbandingan bagi objek wisata lain di Kota Semarang, Jawa Tengah, maupun Indonesia. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan juga menganalisis faktor-faktor aktor pendorong dari implementasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan lawang sewu sebagai tujuan wisata di Kota Semarang. Dalam hal ini guna mengetahui faktor pendukung keberhasilan implementasi pada objek wisata Museum Lawang Sewu dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut George Edward dapat dilihat dari beberapa Faktor, yaitu:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi dalam pelaksanaan pengelolaan di Objek Wisata Museum lawang Sewu merupakan hal yang penting karena pada tahap ini merupakan tahap menyampaikan informasi kebijakan dari pembuat kebijakan yaitu PT. KAI kepada pelaksana kebijakan yaitu manajemen pengelola Objek Wisata Museum Lawang Sewu agar isi, tujuan, arah, serta kelompok sasaran dapat dimengerti oleh para pelaksana kebijakan sehingga target kebijakan dapat tercapai dengan baik dan efisien karena adanya persiapan yang telah dilakukan oleh para

pelaksana kebijakan sebelumnya. Dalam faktor komunikasi yang terjadi antar pengelola Objek Wisata Museum Lawang Sewu ada tiga hal penting dalam prosesnya, yaitu:

- a. Transmisi
- b. Konsistensi
- c. Kejelasan

## 2. Sumber Daya

Salah satu faktor yang penting guna menyukkseskan implementasi pengembangan dan pengelolaan pada objek wisata Museum Lawang Sewu antara lain adalah sumber daya yang dimiliki Pengelola Museum Lawang Sewu untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wisatawan yang datang dan yang akan datang ke museum objek wisata Museum Lawang Sewu. Selain itu dengan sumber daya yang memadai dapat melestarikan Gedung Lawang Sewu. Terdapat beberapa hal yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi faktor pendorong implementasi dalam pengembangan dan pengelolaan Objek Wisata Museum Lawang Sewu, terdiri dari:

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Sarana Prasarana
- c. Anggaran

## 3. Disposisi

Kecenderungan-kecenderungan disini adalah bagaimana sikap dari manajemen pengelola dari Objek Wisata Museum Lawang Sewu dan juga pihak-pihak



terkait dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan efisien. Faktor yang menjadi perhatian penulis mengenai disposisi dalam implementasi dalam pengembangan dan pengelolaan Objek Wisata Museum Lawang Sewu adalah terkait insentif salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan terkait pengembangan dan pengelolaan Objek Wisata Museum Lawang Sewu memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu implementasi kebijakan, salah satu contohnya adalah standar prosedur operasi.

### **1.8 Metode Penelitian**

#### **1.8.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sugiono (2012: 9) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian

deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menggambarkan dan melukiskan dan keadaan subjek atau objek penelitian (Lembaga, masyarakat, daerah) pada saat sekarang yang mendasarkan faktor-faktor yang nampak atau sebagaimana adanya, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pengembangan wisata Lawang Sewu sebagai tujuan wisata Kota Semarang.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokus di Lawang Sewu, Kota Semarang, sebagai salah satu ikon pariwisata yang terkenal Kota Semarang. Penelitian ini berfokus pada studi kasus tentang implementasi terhadap pengelolaan dan pengembangan dan pengelolaan Lawang Sewu.

### **1.8.3 Subyek Penelitian**

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan oleh peneliti dapat menceritakan apa yang diketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau studi kasus yang sedang diteliti. Dengan kata lain disebut sebagai informan.

Moleong (2007) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan dapat menceritakan apa yang diketahui tentang sesuatu berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan yang dibutuhkan adalah seluruh aktor kebijakan, pengunjung, pengelola, dan *stakeholders* yang terkait dalam implementasi kebijakan pengembangan lawang sewu sebagai tujuan pariwisata di Kota Semarang, antara lain:

- a. PT. KAI Pariwisata (DAOP IV Kota Semarang)
- b. Dinas Kepariwisata Kota Semarang
- c. Pihak Pengelola Lawang Sewu

#### **1.8.4 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kualitatif deskriptif yang artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis, teks gambar, dan bukan angka-angka.

#### **1.8.5 Sumber Data**

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

##### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh atau diambil langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kota Semarang, Pengunjung, Pekerja di Lawang Sewu dan masyarakat sekitar.

## 2. Data Sekunder

Data tidak langsung yang diperoleh dari sumbernya, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Bentuk data sekunder yang digunakan berupa catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian sebagai sumber kedua atau sumber sekunder untuk mendukung data primer.

### 1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, antara lain:

#### 1. Observasi

Menurut Nawawi & Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian yang diamati tersebut. Observasi yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian agar data yang diperoleh lebih valid dan juga untuk memperkuat dan meyakinkan hasil wawancara dan fenomena selama proses penelitian dilakukan.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun dengan tanya – jawab secara

langsung. Responden dalam penelitian ini adalah PT Kai Pariwisata, pihak pengelola lawing sewu dan juga Dinas Pariwisata Kota Semarang.

### 3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, bagan, dan sebagainya.

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen berupa catatan-catatan, rekaman, dan foto dari informan.

#### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui analisis data di lapangan Model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016 : 246), yaitu:

##### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai obyek penelitian dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

## 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan yang bersifat deskriptif.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016 : 252) adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi obyek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

### **1.8.8 Kualitas Data**

Menurut Sugiyono (2006:267), Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Lebih lanjut Creswell dalam Jurnal Diah Wulandari ([eprints.undip.ac.id/61410/](http://eprints.undip.ac.id/61410/)) mengemukakan strategi validitas data sebagai berikut:

1. Mentriangulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.
2. Menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. *Member checking* ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi-deskripsi atau tema-tema spesifik ke hadapan partisipan untuk

mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan / deskripsi / tema tersebut sudah akurat.

3. Memberikan deskripsi yang kaya dan padat (*rich and thick description*) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan *setting* penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan.
4. Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian. Dengan melakukan refleksi diri terhadap kemungkinan munculnya bias dalam penelitian, peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur yang akan dirasakan oleh pembaca.
5. Menyajikan informasi “yang berbeda” atau “negatif” (*negative or discrepant information*) yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu.
6. Memanfaatkan waktu yang relatif lama (*prolonged time*) di lapangan atau lokasi penelitian.
7. Melakukan tanya-jawab secara sesama rekan peneliti (*peer de briefing*) untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Proses ini mengharuskan peneliti mencari seorang rekan (*a peer debriefer*) yang dapat mereview untuk berdiskusi mengenai penelitian kualitatif sehingga hasil penelitiannya dapat dirasakan oleh orang lain, selain oleh peneliti sendiri.
8. Mengajak seorang auditor (*external auditor*) untuk mereview keseluruhan proyek penelitian.

Sugiyono (2006:273-274), menjelaskan menjelaskan bahwasanya terdapat tiga macam triangulasi. Ketiga Triangulasi itu antara lain adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pada penelitian ini penulis menggunakan Metode Triangulasi sumber menguji penelitian. Penulis memilih metode triangulasi sumber karena untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel dibutuhkan informan yang beragam sehingga nantinya hasil yang didapat pun tidak hanya dari satu perspektif saja melainkan dimungkinkan untuk melihat suatu fenomena pada penelitian ini dalam kacamata atau perspektif yang berbeda.